

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dari pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penulis sekaligus mengajukan hal-hal yang penting dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. Bab V Mengemukakan jawaban-jawaban permasalahan yang termuat dalam rumusan skripsi ini.

#### **5.1 Simpulan**

Etnis Rohingya merupakan etnis yang tinggal di wilayah Arakan Myanmar, secara fisik tidak menyerupai bangsa Myanmar atau yang bisa disebut *Burmese*. Etnis Rohingya berdomisili di wilayah Arakan dalam waktu ratusan tahun jika dilihat dari sejarah dialami oleh etnis Rohingya. Ketika zaman pra-kolonial etnis Rohingya sudah menetap di wilayah Arakan, walaupun pada perkembangannya akhirnya wilayah Arakan diambil oleh Inggris dan beberapa etnis Rohingya harus mengalami migrasi termasuk ke wilayah Bangladesh. Etnis Rohingya merupakan etnis gabungan dari masyarakat imigran pada abad ke-7 Arakan merupakan tempat pelabuhan beberapa bangsa seperti Arab, Moor, Turki, Asia Tengah dan Bengal (atau biasa dikenal dengan Bangladesh) yang bercampur dengan masyarakat pribumi di Arakan sehingga munculnya etnis baru yang disebut dengan etnis Rohingya.

Permasalahan etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar, tidak lepas dari beberapa kebijakan militer yang dianggap kurang berlaku adil pada etnis minoritas salah satunya adalah etnis Rohingya, dengan pernyataan UNCHR bahwa etnis Rohingya kurang kuat untuk diperjuangkan dalam hukum karena status etnis Rohingya masih belum diakui sebagai etnis resmi di Myanmar. Pergolakan yang terjadi dari pembelaan etnis minoritas. Adapun kebijakan *Burmese* yaitu dengan menekan kebudayaan dengan menjadikan etnis minoritas termasuk Rohingya untuk menjadi *Burmese* yang diketahui dari keyakinan sudah berbeda dengan etnis Rohingya, hal tersebut diperparah dengan keadaan yang ricuh dengan membakar masjid dan diganti dengan pagoda. Keterlibatan etnis

Rohingya menjadi bagian dari warga Myanmar sempat diakui pada tahun 1962, walaupun perkembangannya dengan kebijakan Pasal 18 dalam hukum Myanmar bahwa yang diakui sebagai warga Myanmar harus *Burmese*, oleh sebab itu persyaratan untuk diakui sebagai masyarakat Myanmar dan mendapat fasilitas dari negara Myanmar harus ada pembuktian bahwa etnis atau masyarakat tersebut memiliki dokumen pernah tinggal di Myanmar pada bahkan sebelum tahun 1948.

Peristiwa tersebut melibatkan pemerintahan sehingga perannya cukup terkenal pada masa itu dan mendapat banyak pertentangan dari masyarakat karena pemerintahan yang melarang kebebasan pers atau media dalam meliput pemerintahan, termasuk membatasi pergerakan etnis minoritas di Myanmar. Permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam negeri tapi sampai pihak internasional terlibat dalam persoalan tersebut.

Kebijakan pemerintahan junta militer dalam kurun waktu 1990-2016 mencakup beberapa pemerintahan adalah Saw Maung (1988-1992), Than Shwe (1992-2003), U Khin Nyunt (2003-2004), U Soe Win (2004-2007) dan Thein Sein (2007-2011) yang berkaitan pada masa junta militer. Pada pemerintahan Saw Maung pemerintahan yang demokrasi mulai terbuka walaupun hal itu hanya menjadi wacana. Pada kenyataannya karena adanya hukuman mati bagi para demonstran ditambah lagi relokasi etnis Rohingya. Sementara pada pemerintahan Than Shwe dengan jangka waktu yang cukup panjang, walaupun dalam perkembangannya tidak begitu banyak, pemerintahan pada masa tersebut dianggap tertutup dan rasial hal ini diperkuat dengan adanya nama pada *State Law Order Restoration Council* (SLORC) dilakukan oleh Than Shwe dengan *State Peace Development Council* (SPDC). Perkembangan ekonomi juga dianggap tertutup tidak transparan. Upaya yang dilakukan adalah reformasi industri dengan menanam tanaman dan menggandakan tanaman padi walaupun perekonomian juga bersifat tertutup, ditambah dengan adanya upaya mengembangkan etnis *Burmese* yang mendapat respon kurang baik masyarakat khususnya etnis minoritas. Adapun pemerintahan selanjutnya adalah kebijakan dari perdana menteri Khin Nyunt yang berlangsung sangat singkat dalam kebijakan 7 langkah menuju demokrasi walaupun tidak berjalan di tahun 2003. Kebijakan selanjutnya adalah dari perdana menteri Soe Win yang 3 tahun menjadi perdana menteri

kebijakan yang dilakukan adalah lebih mengisolasi pemerintahan dan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh biksu karena kebijakan Soe Win yang belum bisa diterima masyarakat terlebih untuk etnis minoritas Rohingya, Soe Win disebut dalam artikel tersebut bahwa terlibat dalam penyalpangan etnis Rohingya. Pemerintahan junta militer selanjutnya adalah Thein Sein, umurnya yaitu berusia 67 tahun dan seorang mantan jenderal. Kebijakan dari Thein Sein adalah mendeportasi etnis Rohingya dari negara Myanmar karena etnis Rohingya lebih memungkinkan ditampung di Bangladesh karena secara fisik mirip dengan masyarakat Bangladesh dibanding masyarakat Myanmar. Migrasi yang dilakukan oleh etnis Rohingya sampai pada kurun waktu 2012 ke daerah Bangladesh dan sikapnya yang kurang mengayomi etnis Rohingya membiarkan masalah yang terjadi pada etnis tersebut. Walaupun pada kurun waktu tersebut etnis Rohingya sedang mengalami perselisihan dengan etnis Rakhine.

Pemerintahan selanjutnya adalah pemerintahan sipil yaitu dipimpin oleh Htin Kyaw yang menggantikan Aung San Suu Kyi menjadi perdana menteri karena memiliki warga Negara asing. Aung San yang memiliki kewarganegaraan asing tidak diperkenankan untuk menjadi perdana menteri melainkan menjadi konselor yang jabatannya hamper setara dengan perdana menteri pada tahun 2016. Pemerintahan junta militer berakhir bersamaan dengan terpilihnya NLD menjadi pionir pemerintahan.

Pada umumnya pemerintahan junta militer tidak menjadi jembatan banyak etnis menjadi hal yang menyebabkan pergolakan. Sikap pemerintahan junta militer yang otriter di Myanmar tentu mendapat banyak pergolakan dari masyarakat. Ketika pemilihan umum 27 tahun 1990 yang memenangkan pemilu adalah partai NLD, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Myanmar ingin adanya pergantian pemerintahan selain junta militer. Pemilu tersebut dilaksanakan sebelumnya menunggu waktu 20 tahun pemerintahan junta militer. Lamanya waktu yang digunakan pemerintahan junta militer dalam memegang tonggak pemerintahan merupakan hal yang mencolok terjadi di dalam pemerintahan Myanmar. Peran militer politik Myanmar yang cukup besar, dilihat dari dibentuknya *State Development and Peace Council* (SPDC) walaupun pada

awalnya namanya adalah *State Law and Order Restoration Council (SLORC)* yang diupayakan memperbaiki kondisi politik Myanmar.

Kebijakan junta militer terhadap etnis Rohingya memiliki beberapa dampak yaitu dihapuskan kewarganegaraan etnis Rohingya, kebijakan yang membatasi etnis, dan migrasi yang dilakukan etnis Rohingya. Tidak adanya pengakuan kewarganegaraan etnis Rohingya terlihat dari adanya pembatasan wilayah yang bisa dilewati oleh etnis Rohingya, laki-laki etnis Rohingya diperbolehkan menikah usia 30 tahun sementara wanita 25 tahun. Ditambah dengan keterbatasan dalam memiliki keturunan yang hanya diperbolehkan mengandung 2 anak. adapun kebijakan junta militer yang memunculkan suatu oknum baik yang ada dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan yang ingin membersihkan etnis Rohingya.

Sampai sekarang etnis Rohingya tidak memiliki kejelasan kewarganegaraan. muncul peran ASEAN dalam penyelesaian konflik tersebut, hingga adanya dukungan dengan adanya peran internasional dalam menanggapi kebijakan junta militer terhadap Myanmar. Dihapuskan kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar merupakan upaya ASEAN ingin mempersatukan Myanmar dengan ASEAN dan melengkapi jumlah asosiasi tersebut menjadi 10 negara yang bergabung dalam ASEAN. Dalam konferensi ke-42 di Thailand anjuran dari Perdana menteri Thailand menyarankan bahwa dibentuknya ASEAN way di Myanmar, yang menekan angka kekerasan di Myanmar. Adapun upaya ASEAN yang mengadakan *The ASEAN Interparliamentary Myanmar Caucus (AIPMC)*, yaitu komisi khusus untuk menangani isu Myanmar untuk memajukan demokrasi dan penegakkan Hak Asasi Manusia.

Sorotan internasional juga menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya yaitu ketika PBB yang mulai mengecam pemerintah Myanmar dalam mengakhiri kekerasan terhadap etnis Rohingya. PBB menyarankan adanya diplomasi antar dua pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lembaga OKI juga terlibat menanggapi permasalahan etnis Rohingya khususnya Saudi dan Turki yang memperjuangkan muslim Rohingya dengan mengirimkan kapal-kapal untuk menyelamatkan para pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia pun menanggapi permasalahan yang terjadi terhadap etnis Rohingya dengan

menyatakan bahwa Indonesia mengecam serangan kelompok bersenjata kepada pos polisi dan fasilitas penampungan pengungsian di Muntaw Rakhine *State*. Adapun dari pihak Indonesia bahwa pemerintah Myanmar segera mengambil kebijakan untuk memulihkan keamanan. Kebijakan yang mengurus langsung etnis Rohingya bergantung pada pemerintah yang memberikan kebijakan yang sudah diusulkan lembaga Internasional termasuk negara yang prihatin terhadap kebijakan yang merugikan etnis minoritas yaitu etnis Rohingya.

Pada tahun 2009 etnis Rohingya melakukan migrasi dengan menaiki perahu di berbagai wilayah teritorial yang berbatasan dengan laut timur Hindia jalurnya banyak menuju Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia. Tujuan yang dilakukan oleh etnis Rohingya adalah untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Penyebaran etnis Rohingya juga tersebar di Asia Selatan. Negara yang menjadi tempat pelarian etnis Rohingya untuk dimintai perlindungan adalah Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Masalah yang dialami etnis Rohingya bukan hanya upaya mencari tempat pengungsian melainkan persetujuan dalam menempati pengungsian karena tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini diperparah dari jumlah migrasi yang pergi ke negara Bangladesh itu tidak sedikit.

Kesimpulan yang didapatkan bahwa kebijakan junta militer terhadap etnis rohingya, merupakan suatu hal yang menimbulkan pergolakan baik dari permasalahan identitas etnis Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraan oleh pemerintah junta militer, dari kebijakan pemerintah yang dianggap mendiskriminasi etnis minoritas yaitu etnis Rohingya, pemerintah junta militer dengan otoritas yang tinggi menyebabkan terjadi demonstran yang tidak menerima keseluruhan kebijakan junta militer yang cukup rasis dengan upaya untuk menjadikan etnis nasional yaitu *burmese* untuk melibatkan etnis minoritas supaya sama gaya hidup dan kebudayaannya sama dengan etnis mayoritas di Myanmar. Adapun penegakan demokrasi yang dianggap hanya simbolis saja dan tidak digerakkan untuk membentuk suatu kepentingan pemerintahan. Junta militer di kawasan Myanmar dalam kebijakannya lebih pada membentuk pertahanan dalam militer. Walaupun demikian pemerintahan junta militer bertahan cukup lama terlebih di kawasan Asia Tenggara di Myanmar, menjadi suatu refleksi atau gambaran tentang perkembangan pemerintah selanjutnya baik dari golongan

militer maupun sipil. Keadaan negara Myanmar yang cukup kompleks menjadikan Myanmar penuh dengan konflik terjadi baik dari pemerintah dengan etnis, etnis dengan etnis maupun pemerintahan junta militer dengan pemerintahan sipil. Hal tersebut berlangsung samapai sekarang. Termasuk penegakan demokrasi yang masih belum berdiri mapan di negara Myanmar. Pemerintahan Myanmar kental dengan junta militer yang bertahan dalam waktu yang cukup lama yang bisa dijadikan sorotan kebijakannya terhadap etnis yang beragam di negara Myanmar, sehingga etnis Rohingya sebagai etnis minoritas di Myanmar yang mengalami pergolakan di negara Myanmar sampai berdampak di internasional.

## **5.2 Rekomendasi**

Penulis merekomendasikan skripsi ini untuk menjadi referensi sumber belajar bagai materi sejarah peminatan kelas XII pada kompetensi dasar 3.6. Menganalisis konflik-konflik di Timur-Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika dan Amerika Latin .

Skripsi ini juga bisa menjadi referensi bagi penelitan-penelitaian berikutnya yang akan mengkaji tentang kawasan Asia Tenggara , khususnya mengenai kebijakan junta militer terhadap etnis Rohingya. Adapun banyak ranah yang belum sempat dieksplor lebih lanjut oleh penulis. Berikut ini penulis merekomendasikan beberapa aspek yang dapat dikaji lebih lanjut:

- a. Kebijakan Pemerintah terhadap etnis Rohingya pada bidang ekonomi
- b. Kebijakan Pemerintah terhadap etnis Rohingya pada bidang pendidikan
- c. Kebijakan Pemerintahan terhadap etnis Rohingya pada bidang sosial dan kebudayaan.